

KEMENHUB AJAK MUDIK LEBIH AWAL

Tiket Mudik Gratis Motor Masih Ada

JAKARTA (KR) - Guna menghindari penumpukan pemudik pada tanggal puncak penyelenggaraan Angkutan Hari Raya Idul Fiti 2022, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal. Masyarakat bisa memanfaatkan kuota angkutan motor gratis (MOTIS) yang masih tersedia.

"Per 24 April 2022, masih ada sekitar 7.013 kuota MOTIS yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik," kata Direktur Jenderal Perkerataapian Kemenhub Zulfikri di Jakarta, Senin (25/4).

Dijelaskan Zulfikri, ketersediaan kuota MOTIS ini didasari dari jumlah pendaftar yang sudah tercatat. Per 24 April 2022, pendaftar program MOTIS tercatat 2.267 orang dengan rincian kuota yang masih tersedia untuk keberangkatan awal dari Stasiun Jakarta Gudang sebesar 750 kuota untuk 26 April 2022; 604 kuota untuk 27 April; 754 kuota untuk 28 April; 569 kuota untuk 29 April; dan 646 kuota untuk 30 April 2022.

Sementara untuk arus balik dengan tujuan akhir Stasiun Jakarta Gudang masih tersedia 861 kuota un-

tuk 5 Mei 2022; 810 kuota untuk 6 Mei 2022; 775 kuota untuk 7 Mei 2022; 744 kuota untuk 8 Mei 2022; dan 745 kuota untuk 9 Mei 2022.

Kuota yang masih tersedia ini mencakup Lintas Utara dan Lintas Selatan dengan 11 stasiun yang melayani angkutan MOTIS yaitu Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kroya, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Stasiun Klaten, Stasiun Purwosari, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Semarang Tawang.

Dengan ketersediaan kuota MOTIS yang masih banyak, Zulfikri mengajak masyarakat agar segera mendaftarkan diri untuk melaksanakan mudik lebih cepat dengan memanfaatkan angkutan MOTIS ini. "Terlebih terdapat 13.800 tempat duduk yang sudah dise-

diakan khusus untuk peserta angkutan MOTIS dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah habis tiket reguler," tambahnya.

Adapun kuota kursi yang tersedia bagi peserta MOTIS mencakup kereta api relasi Pasar Senen-Semarang Tawang (PP), dan Pasar Senen-Purwosari (PP). Dengan memanfaatkan kuota kursi khusus ini, calon peserta MOTIS dapat memiliki alternatif tambahan selain tiket travel, bus, maupun tiket kereta api reguler yang sudah habis. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam memanfaatkan program MOTIS ini dan beralih dari kendaraan roda dua.

Program angkutan MOTIS kembali diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) Kemenhub untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat setelah dua tahun tidak melakukan mudik. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Balitbang Kemenhub, diperkirakan sebanyak 85,5 juta masyarakat akan melakukan perjalanan mudik tahun ini, dengan 7,66 juta di antaranya diprediksi akan menggunakan angkutan kereta api.

(Imd)-d

Wapres: Penting, Sertifikasi Tanah Wakaf

JAKARTA (KR) - Jumlah wakaf tanah di Indonesia terus meningkat sekitar 7 persen atau lebih dari 3.000 hektare setiap tahunnya. Hingga kini tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56.000 hektare. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 58 persen yang memiliki sertipikat.

Untuk itu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar sertifikasi tanah wakaf terus dipercepat. Sebab menurutnya, tanpa pencatatan yang baik melalui sertifikasi akan menghambat pemanfaatannya demi kepentingan umat dan bangsa. "Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan

aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa," tegas Wapres saat menghadiri acara Gerakan Percepatan Sertipikat Tanah Wakaf secara daring dan luring, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/4).

Selain itu, sambung Wapres, tanpa adanya sertifikasi tanah wakaf maka akan menyebabkan hilangnya aset wakaf, terjadinya sengketa, dan data aset wakaf menjadi tidak akurat.

"Ketidadaan sertipikat tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset, tapi juga menjadi kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat," ujarnya.

Wapres menuturkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara telah menerbitkan sertipikat wakaf sebanyak lebih dari

25.000 sertipikat pada 2021. Menurutnya tanpa adanya program percepatan, diperlukan waktu 7 hingga 8 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf.

"Pekerjaan ini harus dapat kita selesaikan (secepatnya) karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit dan kian meningkat dari tahun ke tahun," pinta Wapres.

Agar gerakan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan maksimal ke depan, Wapres pun menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan diupayakan oleh berbagai pihak yang terkait.

"Pertama, perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan, persyaratan, dan tahapan sertifikasi tanah wakaf. Ini supaya disosialisasikan," ungkapnya. (Ati)-d

Hasil Lelang, KPK Kumpulkan Rp 3,4 M

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melelang barang rampasan dua terpidana perkara korupsi, yakni Yaya Purnomo dan Sutrisno. Terkait lelang ini KPK berhasil mengumpulkan uang total Rp 3,4 miliar.

"Tim jaksa eksekutor telah selesai melaksanakan lelang barang rampasan dari terpidana Yaya Purnomo dan kawan-kawan. Hasilnya, mengumpulkan Rp 3,4 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/4).

Diungkapkan Fikri, Yaya adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Ia merupakan terpidana perkara suap dan gratifikasi dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID).

Sedangkan Sutrisno merupakan mantan Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW), terpidana dalam perkara korupsi pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian. Adapun lelang barang rampasan dari terpidana Yaya berupa sebidang tanah Kaveling No 33A-Graha Kusuma dengan luas 193 meter persegi.

Tanah tersebut berlokasi di Jalan Dago Pakar Mawar III No 2B di kompleks Resor Pakar Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimanyan Kabupaten Bandung berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah No 33A/GK-MV/II/02-17 pada tanggal 25 Februari 2017 dengan dilengkapi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 03147 (asli).

Selain itu, sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Dago Pakar Mawar II/11 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimanyan Kabupaten Bandung. (Ful)-d



KR-Effy Widjono Putro

PEMAKAMAN BONDAN NUSANTARA: Seniman pantomim Andy Sri Wahyudi melakukan 'performance' di depan keluarga yang membawa abu kremasi maestro ketoprak Bondan Nusantara di Kompleks Makam Seniman Giri Supto, Imogiri, Bantul, Senin (25/4). Bondan Nusantara meninggal di rumahnya, Kasongan, Kasihan, Bantul, Rabu (20/4), jenazahnya dikremasi Yayasan Wahana Mulia Abadi, Yogyakarta, dan abu kremasi baru dimakamkan kemarin setelah beberapa hari disemayamkan di rumah.

Mempertajam Sanksi Otonomi Diri

Dr Ahmad Zuhdi Muhdlor SH MHum



bukan sekadar takut karena akan mendapat hukuman / sanksi yang datang dari luar dirinya, seperti dari masyarakat, atasan, aparat penegak hukum, dan sebagainya.

Orang yang telah berhasil membangun kesadaran *inheren*, akan merasa sangat menyesal misalnya tidak dapat melaksanakan kebaikan. Dalam konteks ibadah, misal, akan merasa sangat bersalah dan malu jika tidak bisa salat tahajud, tidak sempat membaca Alquran (tadarus), atau tidak bisa bersedekah. Kemudian orang itu 'menghukum' dirinya sendiri dengan banyak ber-istighfar atau melakukan perbuatan baik lain yang dianggap dapat menebus kealpaan atau kesalahannya. Inilah yang dalam ilmu hukum disebut Sanksi Otonom, yakni sanksi yang dijatuhkan diri sendiri atas kealpaan atau pelanggaran etik atau moral.

Jika kesadaran Sanksi Otonom ini tumbuh secara masif, maka berbagai pelanggaran dan kejahatan dapat diminimalisir. Sebetulnya TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa telah memberi landasan bagi pentingnya kesadaran menumbuhkan Sanksi Otonom, terutama di kalangan penyelenggara Negara. Orang tidak harus dinyatakan salah setelah ada putusan hukum, tetapi pelanggaran sekecil apapun, baik secara moral maupun etik, harus diakui sebagai kesalahan yang harus disesali, karena hukum (di zaman modern) adalah agama, moral atau etik yang dijadikan norma. Tanpa secara formal melanggar hukum, sebetulnya seseorang sudah terikat dengan agama, moral, dan etika.

Karena itu, keteladanan para pemimpin sangat dibutuhkan untuk menuntun masyarakat menuju perilaku *akhlak al-karimah*. Saat budaya kekerasan, seperti maraknya klitih, gank motor, budaya permisif dan budaya tidak terpuji lainnya terus berkembang dan sulit dibantas melalui sanksi-sanksi heteronom, maka upaya menumbuhkan kesadaran Sanksi Otonom menjadi sebuah keniscayaan. Ramadan merupakan momentum sangat tepat untuk menciptakan kesadaran di atas guna meraih derajat *Muttaqin*. *Allahu A'lam.* (*)

Dr Ahmad Zuhdi Muhdlor SH MHum,
Ketua PWNU DIY dan Wak. Ketua Umum
MUI DIY.

KECURANGAN SELEKSI CASN

Bareskrim Perluas Penyidikan

JAKARTA (KR) - Usai penetapan 30 orang sebagai tersangka kecurangan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021, penyidikan terus diperluas. Pemerintah bersama Polri tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus ini, termasuk jika ada keterlibatan oknum dari instansi terkait termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bareskrim yang membentuk Satgas Anti KKN CASN 2021 mengindikasikan adanya jaringan dalam kasus ini. "Tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti Kementerian PANRB dan BKN terlibat jaringan tersebut. Tim Bareskrim dengan data-data yang ada dan bukti jejak digital pasti ditangani dan diproses," tegas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Senin (25/04).

Menteri Tjahjo mengungkapkan jangan sampai proses seleksi CASN yang sudah berjalan baik dan siapakan melibatkan seluruh instansi, dirusak oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman selama pengadaan CASN atau CPNS sejak tahun lalu, ada oknum pegawai negeri sipil (CPNS) yang menjadi calo dan kemudian diringkus Polri.

Kecurigaan adanya kecurangan ber-

awal dari aduan masyarakat dan orangtua peserta CPNS termasuk melalui media sosial dan temuan BKN. Ada temuan kemudian BKN dan Kementerian PANRB berkoordinasi untuk mengungkap jaringan ini. "Saya datang dan membawa surat kepada Kabareskrim Polri untuk membantu mengusut tuntas jaringan penipuan CPNS dengan berbagai cara. Bareskrim juga membentuk tim serta koordinasi dengan Polda dan Polres seluruh Indonesia," ungkap Menteri Tjahjo.

Kementerian PANRB mengapresiasi dan berterima kasih kepada Korps Tri Brata atas prestasi dan kerja keras jajaran Bareskrim, Polda dan Polres serta Satgas Anti KKN CASN 2021. "Kalau ada oknum PNS yang terlibat, kami proses untuk diberhentikan tidak dengan hormat," ungkap Menteri Tjahjo.

Tentang kasus kecurangan seleksi CASN 2021 ini, 21 sipil dan 9 PNS yang terlibat sudah diringkus Polri. Seluruh tersangka itu disangkakan terlibat dalam kecurangan seleksi CASN 2021 di 10 tempat kejadian perkara (TKP). Sepuluh daerah tersebut berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Di Sulawesi Selatan kecurangan terjadi di beberapa lokasi yaitu Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Palopo, Luwu dan Enrekang. (Ati)-d

Sultan Perbolehkan Gelar Salat Idul Fitri

YOGYA (KR) - Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 dan penerapan PPKM level 2, aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan, termasuk dalam aktivitas peribadatan masyarakat. Dalam Idul Fitri 1443 H, pemerintah termasuk Pemda DIY memperbolehkan masyarakat untuk menunaikan salat Idul Fitri berjamaah. Namun karena pandemi belum berakhir dalam melaksanakan aktivitas tersebut masyarakat diminta tetap mengedepankan prokes. "Kalau untuk salat Idul Fitri saat ini kita sudah ada di level 2, sehingga ketentuan-ketentuan semakin sedikit, jadi kita perbolehkan masyarakat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Hanya kesadaran saja, selama melakukan aktivitas bagaimana mereka tetap menggunakan masker dan mengetatkan Prokes.

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Prokes itu yang paling penting agar kasus Covid-19 tidak melonjak," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di Kompleks Kepatihan, Senin (25/4).

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY Masmin Afif. Menurutnya, masyarakat diizinkan melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah di tanah lapangan. Hal itu menyusul dengan turunnya status PPKM di DIY ke level 2 dan kasus harian Covid-19 yang semakin melandai.

"Tidak ada aturan, jadi *mangga* saja, masyarakat bisa menjalankan salat Idul Fitri. Dengan catatan kegiatan itu dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Apalagi saat ini DIY sudah ada di level 2," ungkap Masmin Afif.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 9 kasus sehingga total 220.469 kasus pada Senin (25/4). Rerata kasus positif harian mencapai 0,33 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 238 kasus. (Ria/Ira)-d

1.118 Izin Usaha Tambang Dicabut

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut sebanyak 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 2,7 juta hektare hingga 24 April 2022. Jumlah tersebut, setara 53,8 persen dari target rekomendasi IUP yang akan dicabut yakni sebanyak 2.078 izin.

"Sampai 24 April yang sudah kita tandatangani IUP dicabut sebanyak 1.118 (izin). Dari 1.118 izin tersebut total areal yang dicabut sebesar 2.707.443 hektare," kata Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (25/4).

Secara rinci, ke-1.118 IUP yang dicabut itu terdiri 102 IUP nikel (setara 161.254 hektare), 271 IUP batu bara (914.136 hektare), 14 IUP tembaga (51.563 hektare), 50 IUP bauksit (311.294 hektare), 237 IUP timah (374.031 hektare), 59 IUP emas (529.869 hektare) dan 385 IUP mineral lainnya (setara 365.296 hektare).

Bahlil mengatakan, pencabutan IUP merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 yang memerintahkan pencabutan 2.078 IUP dan 192 Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), 34.448 hektare Hak Guna Usaha (HGU). (Ant)-d

Sinovac Dijadikan Vaksin Booster

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan akan menjadikan vaksin Sinovac sebagai salah satu vaksin dosis ketiga atau booster. Hal itu didasari adanya rekomendasi penyediaan vaksin halal dari Putusan Mahkamah Agung.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi MEpid mengatakan, Kemenkes menghormati Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 atas rekomendasi untuk penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional.

"Untuk itu masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan vaksin Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan juga sebagai vaksin booster," katanya di

Jakarta, Senin (25/4).

Terkait program vaksinasi Covid-19, Pemerintah berhasil menyediakan enam regimen vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk segera bisa menyesuaikan berbagai kondisi kesehatannya dengan berbagai jenis vaksin yang tersedia. Keenam regimen tersebut terdiri vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm.

Regimen vaksin yang digunakan di Indonesia diperoleh dengan berbagai macam skema baik melalui pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, skema hibah, dan COVAX Facility. (Ati)-d